

ABSTRAK

Judul Skripsi : KEKUATAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH PARTAI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK.
(Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 490 K/TUN/2015)

Nama : ROHMAN
Npm : 1627350005
Kata Kunci : POLITIK, PARTAI POLITIK, SENKETA PARTAI POLITIK, MAHKAMAH PARTAI POLITIK.

Partai politik adalah salah satu pilar demokrasi di negara yang menganut sistem demokrasi menjadi suatu keharusan, Dalam menjalankan peranya sering timbul perselisihan internal atau sengketa internal di dalam tubuh partai salah satunya adalah sengketa kepengurusan yang menimbulkan dualisme kepengurusan. Menurut Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik di lakukan oleh Mahkamah Partai atau sebutan lain merupakan organ partai politik yang memiliki kewewenang (atribusi). Namun dalam kenyataannya belum bisa menyelesaikan, padahal putusan mahkamah partai politik bersifat final dan mengikat. Rumusan masalah 1. Apakah Putusan Mahkamah Partai Politik belum bisa menyelesaikan sengketa internal partai politik yang berkenaan dengan kepengurusan? 2. Apakah putusan yang bersifat final dan mengikat tetapi masih bisa diupayakan dengan hukum lain? Penelitian hukum ini menggunakan metode yuridis normative dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis, berdasarkan analisa dan studi kasus berdasarkan putusan. Putusan Mahkamah Partai GOLKAR ternyata tidak bisa menyelesaikan sengketa internal kepengurusan , kubu Aburizal Bakrie menggugat kubu Agung Laksono dan Menteri Hukum dan HAM ke PTUN Jakarta,PT.TUN dan terus berlanjut sampai kasasi ke Mahkamah Agung, hasil penelitian Mahkamah Partai belum bisa menyelesaikan konflik internal dualisme kepengurusan di Partai GOLKAR. Dan pihak yang tidak puas tidak mentaati dan lebih memilih upaya hukum lain untuk mencari keadilan dan kepastian hukum.